

**PENINGKATAN KEMAMPUAN PENCATATAN KEUANGAN DAN SOSIALISASI
MODEL PEMBIAYAAN PADA PENGRAJIN ROTAN DI KOTA MEDAN****Hasrul Siregar¹, Muhammad Fahmi²**¹Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas IBBI²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utarae-mail: ¹hasrulsiregar23@gmail.com, ²muhammadfahmise@umsu.ac.id

Abstrak : Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang model pembiayaan yang tersedia dan peningkatan kemampuan pencatatan keuangan pada UMKM pengrajin rotan di kota Medan.). Metode pengabdian yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah metode observasi, wawancara dan pelatihan. Hasil pengamatan yang dilakukan dalam pengabdian ini menunjukkan bahwa hambatan utam adalah kurangnya modal (40,48 %), bahan baku (23,75%), marketing(16,96%) , manajemen produksi (3,07%), persaingan (15,74%). Untuk mengatasi masalah ini beberapa pelatihan telah dilakukan antara lain pelatihan tentang pencatatan keuangan seperti pelatihan tentang pembuatan pencatatan sederhana, pelatihan tentang pembukuan sederhana, seperti buku kas, buku penjualan, buku pembelian, buku piutang dan hutang. Disamping itu juga dilakukan sosialisasi tentang model pembiayaan yang disediakan pemerintah seperti KUR dan linkage program beserta jenis-jenisnya.

Kata kunci : pencatatan keuangan, model pembiayaan.

Abstract: *The objective of this community service program is to enhance knowledge regarding available financing models and to improve the financial recording capabilities of rattan artisan MSMEs in Medan . The methods employed in this initiative included observation, interviews, and training sessions. Observations revealed that the primary obstacles faced were a lack of capital (40.48%), raw materials (23.75%), marketing (16.96%), production management (3.07%), and competition (15.74%). To address these issues, several training sessions were conducted, specifically focusing on financial recording—such as creating simple records and maintaining basic bookkeeping logs (cash books, sales ledgers, purchase ledgers, and accounts receivable/payable records). Additionally, information was disseminated regarding government-provided financing models, such as the People's Business Credit (KUR) and linkage programs, along with their various types.*

Keywords: *financial recording, financing models.*

1. PENDAHULUAN

Tak dapat dipungkiri bahwa perhatian pemerintah Indonesia terhadap keberadaan UMKM sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UMKM itu sebagai sentra pendapatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Berbagai upaya yang dilakukan dari mulai yang sifatnya kebijakan struktural maupun kebijakan yang sifatnya operasional. Seperti kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk sebuah departemen untuk mengurus kebijakan-kebijakan yang menyangkut usaha kecil menengah dan koperasi. Untuk yang bersifat operasional, pemerintah Republik Indonesia telah banyak membuat peraturan peraturan pemerintah menyangkut manajemen, pelatihan dan bahkan pendanaan.

Dari sisi pembiayaan, keseriusan pemerintah terlihat dari porsi pemberian kredit UMKM yang cukup signifikan beberapa tahun belakangan ini. Tidak hanya dari sisi kebijakan pemerintah pusat, juga kebijakan perbankan yang sangat berpihak kepada UMKM seperti pemberian kredit-kredit mikro dan bantuan-bantuan koperasi, dimana hal tersebut diatur dalam peraturan-peraturan perbankan yang dibuat oleh pemerintah melalui kebijakan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Namun kenyataan yang dialami adalah pertumbuhan pendapatan atau perkembangan UMKM jauh dari harapan. Hal ini disebabkan kelemahan internal UMKM itu sendiri seperti manajemen dan wirausahayang lemah, teknik produksi yang tidak memadai dan infrastruktur yang tidak mendukung. Infrastruktur yang dimaksud termasuk akses terhadap sumber modal, pasar, informasi, teknologi, sarana dan prasarana.

Dari berbagai sumber yang telah dirangkum, persoalan terbesar dari UMKM adalah kurangnya modal (40,48 %), bahan baku (23,75%), Marketing (16,96%) , Manajemen Produksi (3,07%), persaingan (15,74%). Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa persoalan terbesar adalah kurangnya modal. Kekurangan modal membuat pelaku UMKM tidak bisa terlalu agresif dalam mengembangkan usahanya, sehingga hanya mampu bertahan dengan tekanan tinggi. Persoalan kekurangan modal ini ternyata lebih disebabkan juga oleh ketidakmampuan UMKM dalam mengakses bank selalu pemberi pinjaman padahal pemerintah melalui bank-bank umum sudah mengucurkan kredit mikro dalam bentuk KUR. Berbagai alasan yang muncul adalah bahwa pelaku UMKM tidak memiliki catatan keuangan yang baik bahkan tidak memiliki catatan sama sekali, sehingga bank atau lembaga keuangan tidak yakin dengan keberadaan UMKM tersebut. Dari sisi usaha memang bisa menjanjikan bisnis yang baik, namun dari sisi internal keuangan tidak baik, istilah ini sering disebut layak tapi tidak *bankable*.

Beberapa pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi pengrajin rotan di kota Medan, memiliki permasalahan yang lebih kurang sama dengan paparan diatas, yaitu kurangnya modal karena tidak bisa diakses oleh bank. Para pelaku UMKM tersebut tidak memiliki catatan keuangan yang baik. Alasan mereka para pelaku UMKM pengrajin rotan adalah ketidak mampuan dalam melaksanakan pembukuan yang baik. Disamping itu para pelaku UMKM juga banyak yang belum mengetahui model-model pembiayaan sebagai sarana untuk kemajuan dari sisi pemenuhan kebutuhan modal. Untuk itu diperlukan upaya untuk melatih para pengrajin rotan ini untuk bisa membuat pembukuan sederhana dan sosialisasi beberapa bentuk model pembiayaan.

2. METODE PENGABDIAN

Agar pelatihan ini berdaya guna, tepat sasaran metode pengabdian yang dilakukan adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi pelatihan dan sosialisasi model pembiayaan.

2.1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap persoalan yang dialami oleh para pelaku UMKM Pengrajin rotan. Hasil observasi dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan persoalan atau hambatan utama yang dialami pelaku UMKM Pengrajin Rotan.

2.2. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pelaku UMKM pengrajin rotan. Wawancara dilakukan dengan objek permasalahan utama yang dialami oleh pelaku UMKM pengrajin rotan. Hasil wawancara ini diperlukan untuk mendukung data-data yang diperoleh dari hasil observasi.

2.3. Dokumentasi Pelatihan

Metode ini dilakukan dengan mendokumentasikan dengan baik hasil-hasil pelatihan yang dilakukan. Pelatihan dilakukan dalam hal ini adalah pelatihan tentang pembukuan sederhana untuk UMKM. Adapun materi pelatihan adalah penting pembukuan, prinsip dasar pembukuan, buku-buku pembukuan sederhana, menghitung laba rugi, menghitung modal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Temuan Berdasarkan Observasi dan Wawancara

Pelatihan dan sosialisasi dilakukan pada 22-23 April 2026. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM Pengrajin Rotan di Kota Medan, ada beberapa hasil yang bisa dikemukakan, antara lain :

Jumlah sampel sebanyak 50 UMKM Pengrajin Rotan yang tergabung dalam Koperasi Industri dan Kerajinan Rotan. Dari hasil observasi ternyata pelaku UMKM Pengrajin rotan lebih didominasi oleh pria 86 % dan wanita hanya 7 % Dalam kaidah pinjaman, memang wanita lebih bertanggung jawab dalam pengembalian pinjaman. Namun dalam hal ini ada pengecualian, sebab 100 % pengrajin adalah kepala keluarga, sehingga tingkat tanggung jawab untuk pengembalian pinjaman lebih tinggi. Justru wanita lebih difokuskan untuk pengelolaan keuangan saja. Kultur masyarakat di daerah Medan dan kebanyakan wilayah di Indonesia, pria lebih dominan dalam mengelola bisnis keluarga. Wanita lebih cenderung sebagai book keeping saja, sehingga pencatat bisa lebih baik.

UMKM Pengrajin Rotan di kota Medan memiliki usia yang sangat produktif, hanya 20 % yang berumur diatas 55 tahun. Selebihnya 80 % berumur antara 30 tahun sampai dengan 55 tahun. Data ini memberikan gambaran bahwa dari segi usia, pemberian pinjaman tidaklah menjadi suatu hambatan yang berarti. Secara garis besar responden mampu mengelola pinjaman dengan baik, karena usia tersebut masih tergolong sangat produktif.

Dari hasil wawancara dan tabulasi data kuestionair, ditemukan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM Pengrajin Rotan adalah usaha mereka tidak mempunyai badan hukum yang jelas. 82% responden dinyatakan tidak mempunyai badan hukum. Hal ini sangat menghambat akses mereka untuk mendapat pinjaman dari perbankan. Untuk skema pinjaman yang lebih besar yang ditawarkan perbankan selalu mensyaratkan adanya badan hukum bisnis yang dikelola. Keadaan ini justru mendorong pengdi untuk membentuk pola pinjaman tanpa memerlukan badan usaha. Justru diperlukan kehadiran institusi mikrolending -memberikan pinjaman untuk bisnis yang tidak berbadan hukum. Pengabdian selanjutnya akan difokuskan terhadap permasalahan mikrolending ini.

Hampir seluruh (88 %) modal awal responden berasal dari tabungan sendiri, hanya 3 % yang berasal dari pinjaman bank. Penggunaan tabungan sendiri sebagai modal awal dalam memulai bisnis menunjukkan itikad kuat untuk mengembangkan bisnis. Alasan ini dapat dijadikan faktor yang mendukung untuk memberikan akses kepada perbankan.

Sumber penambahan modal dari UMKM Pengrajin Rotan dominan berasal dari bank dan tabungan sendiri (56 %), sebanyak 30 % tidak pernah menambah modal. Jumlah tambahan modal yang berasal dari bank (17 responden) berkisar antara Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 100 juta. Data ini juga menunjukkan bahwa masih banyak UMKM Pengrajin Rotan belum dapat mengakses pinjaman. Pinjaman koperasi sama sekali tidak ada (0 %), pinjaman dari perusahaan juga tidak ada, peran BMT dan Pegadaian sebagai sumber modal juga belum terlihat, hanya 4 %.

Selain itu, diperoleh data bahwa 90% responden tidak pernah mendapatkan KUR, padahal KUR merupakan salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi untuk memberikan pinjaman kepada kelompok usaha mikro. Kesulitan ini disebabkan beberapa kendala, yaitu: 82 % UMKM Pengrajin Rotan tidak berbadan hukum sehingga sulit untuk mendapat pinjaman yang layak dari perbankan. Kendala lain, antara lain : keharusan penyediaan agunan (90% menjawab sangat kesulitan menyediakan agunan), bunga bank tinggi (52% menjawab bunga bank sangat tinggi), penyediaan data perusahaan yang rumit (18%), dan 12 % menyatakan paket yang ditawarkan belum tepat.

3.2. Sosialisasi Model Pembiayaan

Dari hasil informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi, ternyata pelaku UMKM sebahagian besar belum mengetahui beberapa bentuk atau model pembiayaan yang tersedia. Untuk mnyeragamkan pengetahuan, pengabdi melakukan sosialisasi tentang model pembiyaan. Dari sosialisasi itu, pengabdi menjelaskan beberapa bentuk yang tersedia dan juga menjelaskan tentang model-model yang ada untuk menambah pengetahuan para UMKM. Adapun beberapa model yang dijelaskan antara lain :

1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable) sering disebut Klaster 2 dan Klaster 3 (feasible tetapi belum bankable). Program KUR yang bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi.
- c. Sebagai upaya penanggulangan dan pengurangan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. KUR diberikan kepada unit UMKM yang mempunyai usaha produktif, layak tetapi belum bankable. Produktif dimaksudkan menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR. Belum Bankable adalah UMKM dan Koperasi yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank, seperti dalam penyediaan agunan.

2. Lingkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi

Lingkage Program merupakan program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dibentuknya lingkage program ini dilatar belakangi masih

ditemukannya persoalan-persoalan keterbatasan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan oleh Usaha Mikro dan Kecil. Program ini bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan akses UMK terhadap fasilitas pembiayaan / kredit modal kerja atau investasi melalui linkage program antara bank umum dan koperasi. Di samping itu hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu melayani UMK dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, terutama untuk daerah yang jauh dari layanan perbankan.

Ada 3 model Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi, yaitu:

Model Executing :

Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka pinjaman / pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi.

Model Channeling :

Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank umum. Pencatatan di bank umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi pada off balance sheet.

Model Joint Financing :

Pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan outstanding credit bagian bank umum dan bagian koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi

Sosialisasi dibatasi pada kedua model ini saja, dan jika dimungkinkan akan dilanjutkan kepada pengabdian periode berikutnya.

3.3. Sosialisasi dan Pelatihan Pembukuan Sederhana

Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan berupa penting pembukuan, prinsip dasar pembukuan, buku-buku pembukuan sederhana, menghitung laba rugi, menghitung modal. Adapun tujuan dari pelatihan ini diharapkan pelaku UMKM mampu memahami perlunya pengetahuan tentang pembukuan, bisa melakukan pencatatan setiap transaksi secara kontinue, mampu menghitung rugi laba, memahami posisi kas pada waktu tertentu, mengetahui modal awal dan perkembangan modal, penggunaan buku atau *spreadsheet* dalam pencatatan.



Gambar 3.1. Peninjauan Kegiatan Produksi Pengrajin Rotan di Kota Medan

Sesi selanjutnya pengabdi menjelaskan tentang pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan untuk usaha. Jika menggunakan uang kas usaha untuk kepentingan pribadi harus dilakukan pencatatan. Transaksi yang dijelaskan kepada peserta pelatihan antara lain transaksi penjualan, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran tagihan, biaya transportasi, penambahan modal usaha. Peserta pelatihan juga mendapatkan penjelasan tentang buku pembukuan sederhana, seperti buku kas, buku penjualan, buku pembelian, buku piutang dagang, buku hutang. Kemudian diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan sederhana.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan utama yang menyebabkan UMKM pengrajin rotan tidak dapat mengakses perbankan adalah : tidak mempunyai badan hukum, tidak mampu menyediakan jaminan, bunga bank tinggi, penyediaan data perusahaan yang rumit karena tidak memiliki pencatatan yang teratur dan kontinu. Sumber modal awal UMKM lebih dominan berasal dari tabungan. Peran perbankan sebagai sumber penambahan modal bagi UMKM masih sangat kecil. Penggunaan KUR sebagai sumber penambahan modal bagi UMKM masih sangat kecil.

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang model pembiayaan dan kemampuan pencatatan pembukuan sederhana diperlukan pelatihan yang kontinu.

Pemerintah harus lebih agresif dalam memberikan ruang peningkatan pembiayaan pinjaman melalui mekanisme yang lebih mudah, tidak hanya berbasis jaminan tetapi berbasis prospek bisnis. Juga dibutuhkan sosialisasi berkelanjutan tentang model pembiayaan yang tersedia, mengingat banyak peserta UMKM yang tidak mengetahui model model pembiayaan yang berkembang. Seperti model *village banking*, *saving loan association*, *group lending* seperti yang sudah dikembangkan di berbagai negara tetangga. Pengabdi juga menyarankan agar pengabdian sejenis terus ditingkatkan periode mendatang, karena perlu pembenahan terus menerus untuk meningkatkan kapasitas UMKM.

5. REFERENSI

Bank Indonesia (2026); diakses melalui <http://www.bi.go.id>

Bank Indonesia (2026) ; diakses melalui <http://infokm.wordpress.com>

Biro Pusat Statistik (2026) ; diakses melalui <http://bps.go.id>

Biro Kredit Bank Indonesia (2026), Biro Kredit Hasil Penelitian Profil Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Bank Indonesia

Chaves, R.A. and C. Gonzales-Vega (2020), Principles of Regulation and Prudential Supervision and Their Relevance for Microenterprise Finance Organizations, London : Intermediate Technology

Fuglesang, A. and D. Chandler (2021) Participation as Process : What we can learn from the Grameen Bank, Bangladesh, Oslo : NORAD

Goetz, A. and R.Sen Gupta (2021), How takes the credit ? Gender; Power and Control Over Loan Use in Rural Credit Programmes in Bangladesh, World Development, Vol. 24, No. 1 pp. 45-63

Grameen Bank For the Poor : Microcredit <http://grameen.info.org//index.html>

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi, No. 03/Per/M.KUK/III/2009